

PENYUSUNAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2028

**Gede Rasben Dantes^{1*}, I Ketut Resika Arthana²,
I Made Ardwi Pradnyana³, I Made Gede Sunarya⁴, Made
Windu Antara Kesiman⁵, Luh Joni Erawati Dewi⁶, Kadek
Yota Ernanda Aryanto⁷ A.A. Gede Yudhi Paramartha⁸, I
Made Dendi Maysanjaya⁹, I Nyoman Saputra Wahyu
Wijaya¹⁰ Ketut Agus Seputra¹¹, I Made Edy Listartha¹²,
Gede Arna Jude Saskara¹³, I Gede Mahendra
Darmawiguna¹⁴, Made Anik Widyastuti¹⁵**

¹⁻¹⁴Jurusan Teknik Informatika,
Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha

¹⁵Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng.

*e-mail: rasben.dantes@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan SPBE yang selaras dengan pembangunan daerah memerlukan panduan untuk mengurangi risiko kegagalan akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah. Dokumen peta rencana SPBE diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan dalam pengembangan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024-2028. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun dokumen peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng yang nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, sebagai acuan pengembangan infrastruktur SPBE dan sebagai acuan arah kebijakan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan visi dan misi pemerintah kabupaten Buleleng. Penyusunan dokumen peta rencana SPBE pemerintah kabupaten Buleleng melalui 4 tahap yaitu *visioning, analysing, direction, dan recommendation*. Dokumen peta rencana SPBE memuat sasaran program/ kegiatan, inisiatif strategis, muatan, program dan kegiatan. Sasaran program/kegiatan merupakan sasaran program/kegiatan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Inisiatif strategis arsitektur SPBE merupakan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital. Peta rencana SPBE terdiri dari 7 muatan yaitu: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur TIK, Keamanan dan Audit TIK. Program merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan

dalam rangka mendukung inisiatif strategis dan kegiatan merupakan rincian aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan. Dokumen peta rencana SPBE senantiasa perlu dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan TIK serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Kata kunci: Peta, Rencana, SPBE, Buleleng

ABSTRACT

The development of SPBE in line with regional development requires guidelines to reduce the risk of failure due to insufficient target achievement. The SPBE road map document is expected to provide an overview and direction in the development of the SPBE for a five-year period of 2024-2028. The aim of this research is to prepare a SPBE planning map document for the Buleleng Regency Government which can later be used as a consideration in developing human resources in the fields of technology, information and communication, as a reference for SPBE infrastructure development and as a reference for policy direction for developing an electronic-based government system in accordance with the vision and the mission of the Buleleng district government. The preparation of the SPBE road map document through four stages: visioning, analysing, direction, and recommendation. The SPBE road map document contains targets of program/activities, strategic initiatives, loads, programmes and activities. Targets of the programme/activity are targets for the program /activities of the Buleleng District Regional Development Plan document 2023-2026. The SPBE Architecture Strategic Initiative is a strategic initiative of the SPBE Regional Government Architecture in accordance with the themes of digital services. The SPBE road map consists of 7 charges: SPBE Governance, SPBE Management, Services, Applications, ICT Infrastructure, ICT Security and Audit. Programmes are activities that will be implemented in order to support strategic initiatives and activities are details of activities which will be carried out to support the implementation of the planned programmes. The SPBE road map document always needs to be reviewed and realigned in line with ICT developments and changes that occur in the Buleleng Regency Government organization.

Keywords: Map, Plan, SPBE, Buleleng

PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi informasi berperan sebagai salah satu motor penggerak dalam proses pembangunan daerah. Perencanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang selaras dengan perencanaan pembangunan diperlukan agar peran TIK optimal dalam mendukung menjalankan laju pembangunan daerah.

Dasar hukum dalam penyusunan Peta rencana SPBE Pemerintah

Kabupaten Buleleng tahun 2024 - 2028 adalah sebagai berikut: Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi, dimana integrasi mulai dari antar organisasi perangkat daerah (OPD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat.

Arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE merupakan panduan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 khususnya dalam melakukan tata kelola SPBE. Arsitektur SPBE memberikan kerangka dalam melakukan integrasi tata kelola unsur-unsur SPBE sedangkan peta rencana SPBE akan mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola SPBE menjadi lebih efektif dan efisien.

Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2024-2028. Penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, dan peta rencana SPBE nasional. Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Maksud dari penyusunan Peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah untuk memberikan landasan berpikir, standarisasi, penahapan, dan implementasi bagi pengembangan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Buleleng yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu. Tujuan dari penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: menyediakan arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Buleleng yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng; menyediakan acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi; menyediakan acuan dalam pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng; menyediakan acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE; menyediakan acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

Penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dokumen peta rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

METODE

Metodologi penyusunan dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari empat tahapan yakni visioning, analysing, direction, dan recommendation (Cassidy, 1998). Tahap, aktivitas dan output dari aktivitas ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Metodologi Penyusunan Dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tahap	Aktivitas	Output
Tahap 1: <i>Visioning</i>	a. Persiapan administrasi dan teknis kegiatan b. Membuat perencanaan c. Menyusun instrumen pengumpulan data d. Sidang TPM (pembahasan awal)	Laporan pendahuluan
Tahap 2: <i>Analyzing</i>	a. Penyiapan perangkat pengumpulan data	Laporan kondisi aktual

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengumpulan data c. Pengolahan dan analisis data d. Menyusun laporan kondisi penerapan SPBE saat ini e. Forum diskusi 1 	SPBE
Tahap 3: <i>Direction</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penentuan sasaran program/kegiatan dokumen strategis b. Pengkategorian sesuai inisiatif strategis arsitektur SPBE c. Pengkategorian sesuai muatan peta rencana SPBE d. Penentuan program dan kegiatan e. Forum diskusi 2 	Draft dokumen peta rencana SPBE
Tahap 4: <i>Recommendation</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan laporan akhir b. Sidang TPM c. Pelaporan 	Dokumen peta rencana SPBE

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu.

Penyusunan Peta Rencana SPBE sudah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 18 tahun 2022 tentang “Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE”.

A. Keterkaitan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional

Menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 18 tahun 2022, Peta Rencana SPBE

dikelompokkan menjadi Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat (IP) dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah (PD). Keterkaitan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah:

1. Peta Rencana SPBE Nasional, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE yang diterapkan secara nasional sebagai panduan bagi IPPD dalam menyusun Peta Rencana SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

B. Substansi Peta Rencana SPBE

Substansi Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari:

1. Sasaran program/kegiatan, merupakan sasaran program/kegiatan dari dokumen Strategis Pemerintah Daerah yakni Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
2. Inisiatif strategis arsitektur SPBE, Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital;
3. Muatan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari 7 muatan yaitu: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur TIK, Keamanan dan Audit TIK.
4. Program, merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis;
5. Kegiatan, merupakan rincian aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan.

Ilustrasi substansi peta rencana SPBE ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi Substansi Peta Rencana SPBE.

C. Sasaran Program/ Kegiatan dan Inisiatif Strategis

Pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 tercantum bahwa permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah pada urusan wajib non pelayanan dasar khususnya urusan Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Terbatasnya jumlah SDM di bidang TIK di Pemerintah Kabupaten Buleleng
2. Belum optimalnya proses integrasi aplikasi yang tersebar di instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng
3. Penerapan e-government belum optimal.

Sementara itu, isu strategis urusan komunikasi dan informatika yaitu:

1. Indeks domain tata kelola SPBE belum optimal
2. Keterbatasan infrastruktur jaringan sehingga belum mampu menyediakan akses internet yang baik secara merata di wilayah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan, salah satunya adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan salah satu sasarnya yaitu optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance).

Peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng mengandung substansi sasaran program/ kegiatan strategis dan inisiatif strategis. Sasaran program/kegiatan bersumber dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 yang dapat didukung dari realisasi arsitektur SPBE melalui inisiatif strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE.

Sasaran program/ kegiatan strategis peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah “Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)”. Penentuan ini mencakup Indikator serta target yang telah direncanakan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.

Inisiatif strategis Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028 merupakan Inisiatif strategis yang terdapat di Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai dengan tematik layanan digital. Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028 adalah “Peningkatan Indeks SPBE”. Inisiatif strategis tersebut sejalan dengan tematik layanan digital. Tematik layanan digital merupakan salah satu aspek implementasi SPBE yang mana aspek lainnya adalah aspek administratif atau tata kelola. Aspek administratif/ tata kelola mencakup kebijakan, perencanaan, pedoman manajemen. Aspek implementatif mencakup tematik layanan digital. Tematik layanan digital terdiri dari layanan publik baik layanan kepada masyarakat (Government to Citizen/G2C) maupun layanan kepada dunia usaha (Government to Business/G2B) dan layanan administrasi pemerintahan (Government to Government/G2G dan Government to Employee/G2E).

D. Muatan Peta Rencana

Tabel 2. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028.

No	Project/ Activities	UIC	Baseline		Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS: Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)									
Indikator	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,03 (Baik)		3,20 (Baik)	3,30 (Baik)	3,40 (Baik)	3,50 (Baik)	3,60 (Sangat Baik)
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE: Peningkatan Indeks SPBE									
1	Tata Kelola								
A	Penguatan Kebijakan Internal SPBE								
	1 Mengkaji, Mengevaluasi dan Menetapkan Kebijakan Internal SPBE (Indikator 1, Indikator 2, Indikator 3, Indikator 4, Indikator 5, Indikator 6, Indikator 7, Indikator 8, Indikator 9, Indikator 10)	DISKOMINFOSANTI dan BAGIAN HUKUM SETDA		Belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Perencanaan SPBE								
	1 Menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah (Indikator 14)	BAPPEDA		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 Monitoring dan Mengevaluasi Peta Proses Bisnis (Indikator 14)	BAGIAN ORGANISASI SETDA		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

No	Project/ Activities	UIC	Baseline		Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3 Mengembangkan Peta Proses Bisnis (Indikator 14)	SELURUH PERANGKAT DAERAH		Belum dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4 Menyusun dan Mengevaluasi Rencana dan Anggaran SPBE (Indikator 13)	TIM KOORDINASI SPBE		Sudah dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5 Mengkaji dan Mengevaluasi Peta Rencana SPBE (Indikator 12)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE								
	1 Evaluasi Kinerja dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE (Indikator 19)	SEKRETARIS DAERAH		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D	Pengelolaan Arsitektur SPBE								
	1 Mengkaji dan Mengevaluasi Arsitektur SPBE (Indikator 11)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Manajemen								
A	Penyusunan Pedoman Manajemen								
	1 Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko SPBE (Indikator 21)	INSPEKTORAT DAERAH		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 Penyusunan Pedoman Manajemen Data (Indikator 23)	BAPPEDA		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3 Penyusunan Pedoman Manajemen Layanan SPBE (Indikator 28)	DISKOMINFOSANTI		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4 Penyusunan Pedoman Manajemen SDM TIK (Indikator 25)	BKPSDM		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5 Penyusunan Pedoman Manajemen Aset TIK (Indikator 24)	BKPD		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6 Penyusunan Pedoman Manajemen Pengetahuan (Indikator 26)	BKPSDM		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7 Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan (Indikator 27)	BAGIAN ORGANISASI SETDA		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8 Penyusunan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi (Indikator 22)	DISKOMINFOSANTI		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Penerapan Manajemen SPBE								
	1 Penerapan Manajemen Risiko SPBE (Indikator 21)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2 Penerapan Manajemen Data (Indikator 23)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3 Penerapan Manajemen SDM TIK (Indikator 25)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4 Penerapan Manajemen Aset TIK (Indikator 24)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5 Penerapan Manajemen Pengetahuan (Indikator 26)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 Penerapan Manajemen Perubahan (Indikator 27)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (Indikator 22)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Layanan								



No	Project/ Activities	UIC	Baseline		Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A	Penerapan Manajemen Layanan SPBE								
	1 Optimalisasi Manajemen Layanan SPBE (Indikator 28)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum optimal	☑	☑	☑	☑	☑
B	Perencanaan Portal Layanan Publik Terintegrasi								
	1 Membangun Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	DISKOMINFOSANTI		Belum ada	☐	☑	☐	☑	☐
C	Perencanaan Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi								
	1 Membangun Portal Administrasi Pemerintahan Terintegrasi	DISKOMINFOSANTI dan PSE		Belum ada	☐	☑	☑	☑	☑
D	Survey Penggunaan SPBE								
	1 Survey Kepuasan dan Kebutuhan Pengguna Layanan Publik SPBE (Indikator 28, Indikator 42, Indikator 43, Indikator 44)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum optimal	☑	☑	☑	☑	☑
	2 Survey Kepuasan dan Kebutuhan Pengguna Layanan Administrasi Pemerintahan SPBE (Indikator 28, Indikator 32, Indikator 33, Indikator 34, Indikator 35, Indikator 36, Indikator 37, Indikator 38, Indikator 39, Indikator 40, Indikator 41)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum optimal	☑	☑	☑	☑	☑
4	Aplikasi								
A	Pengembangan Aplikasi SPBE								
	1 Mengkaji Pedoman Teknis Pengembangan Aplikasi SPBE (Indikator 4)	DISKOMINFOSANTI		Sudah dilakukan	☑	☐	☑	☐	☑
	2 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengembangan Aplikasi SPBE (Indikator 4)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	☑	☑	☑	☑	☑
	3 Menyusun Dokumen Aktivitas Pengembangan Aplikasi SPBE (Indikator 15)	TIM KOORDINASI SPBE DANPSE		Beberapa Sudah Dilakukan	☑	☑	☑	☑	☑
	4 Mengevaluasi Usulan Pengembangan Aplikasi SPBE (Indikator 15)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum optimal	☑	☑	☑	☑	☑
	5 Melakukan Aktivitas Operation pada siklus DevOps dalam pengembangan aplikasi SPBE (Indikator 15)	DISKOMINFOSANTI dan PSE		Belum dilakukan	☑	☑	☑	☑	☑
	6 Mendata Aplikasi Khusus dan Kode Sumbernya serta Menyimpan diRepository Diskominfo (Indikator 4, Indikator 15)	DISKOMINFOSANTI dan PSE		Belum optimal	☑	☑	☑	☑	☑
	7 Mendaftarkan dan Mengalihkan Hak Cipta Aplikasi PSE dan Kode Sumberke Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. (Indikator 4, Indikator 15)	DISKOMINFOSANTI dan PSE		Belum ada	☑	☑	☑	☑	☑
	8 Evaluasi kebutuhan penerapan Kecerdasan Buatan pada Aplikasi dan DataSPBE	DISKOMINFOSANTI dan PSE		Belum ada	☐	☐	☑	☑	☑
	9 Pembangunan Aplikasi SPBE Single Sign On (Indikator 15)	DISKOMINFOSANTI		Belum ada	☑	☑	☐	☐	☐
	10 Membangun Data Warehouse/Big Data (Indikator 3, Indikator 15, Indikator 23)	DISKOMINFOSANTI		Belum ada	☐	☑	☑	☐	☑



No	Project/ Activities	UIC	Baseline		Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	11 Membangun Aplikasi Executive Information System (EIS) (Indikator 15, Indikator 32-47)	DISKOMINFOSANTI dan PSE		Belum ada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12 Membangun Sistem Repository Kode Sumber Aplikasi SPBE (Indikator 15, Indikator 32-47)	DISKOMINFOSANTI		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	13 Melakukan Review dan Evaluasi Terkait Integrasi Aplikasi SPBE (Indikator 15, Indikator 32-47)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Pemanfaatan Aplikasi Umum								
	1 Memfasilitasi Penggunaan dan Penerapan Aplikasi Umum (Indikator 4, Indikator 15)	DISKOMINFOSANTI		Sudah dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2 Melakukan Review dan Evaluasi Penerapan Aplikasi Umum (Indikator 15, Indikator 32-47)	PSE		Sudah dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Infrastruktur								
A	Mengembangkan Pusat Data								
	1 Koordinasi Penentuan Lokasi Pusat Data Daerah (Indikator 16)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum terpusat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 Membuat Dokumen Feasibility Study dan Detail Engineering Design PusatData Berstandar SNI 8799-1: 2019 (Indikator 16)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum Ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3 Melakukan Migrasi Aplikasi ke Pusat Data Nasional (Indikator 16)	DISKOMINFOSANTI		Sudah ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4 Menyusun Dokumen SOP Pusat Data Daerah (Indikator 16)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5 Melakukan Migrasi Server Perangkat Daerah (Dinas DUKCAPIL, BPKPD, RSUD) ke Pusat Data Daerah (Indikator 16)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum Ada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6 Koordinasi Pemindahan Aplikasi ke Pusat Data Daerah dengan SeluruhPerangkat Daerah (Indikator 16)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum Ada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7 Pengembangan Pusat Data Daerah(Indikator 16)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum Ada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8 Melakukan Pemindahan Aplikasi Khusus ke Pusat Data Daerah(Indikator 16)	DISKOMINFOSANTI		Belum Ada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Sistem Penghubung Layanan								
	1 Mendaftarkan Layanan SPBE Perangkat Daerah ke Sistem SPLP (Indikator 18)	DISKOMINFOSANTI		Belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2 Mengelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Indikator 18)	DISKOMINFOSANTI		Belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3 Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Antar Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Pelaku Usaha dan Masyarakat	TIM KOORDINASI SPBE		Belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



No	Project/ Activities	UIC	Baseline		Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(Indikator 20)								
C	Jaringan Intra								
	1 Menghubungkan Jaringan Intra Daerah dengan Jaringan Intra Provinsi (Indikator 17)	DISKOMINFOSANTI		Belum Ada	☑	☐	☐	☐	☐
	2 Menyusun Dokumen Penerapan (Panduan, SOP) Jaringan Intra Daerah (Indikator 17)	DISKOMINFOSANTI		Belum optimal	☑	☐	☐	☐	☐
	3 Mengelola Jaringan Intra Daerah (Indikator 17)	DISKOMINFOSANTI		Ada	☑	☑	☑	☑	☑

6 Keamanan										
A	Penerapan Keamanan									
	1	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keamanan. (Indikator 22)	DISKOMINFOSANTI		Belum optim	☑	☑	☑	☑	☑
	2	Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan, Audit, Identifikasi dan Evaluasi Keamanan. (Indikator 22)	DISKOMINFOSANTI		Belum Ada	☑	☐	☐	☐	☐
	3	Pelaksanaan Monev, dan Pengendalian Resiko Keamanan. (Indikator 22)	DISKOMINFOSANTI		Belum optim	☐	☑	☑	☑	☑
	4	Melakukan Sosialisasi Penerapan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Keamanan. (Indikator 22)	DISKOMINFOSANTI		Belum optim	☑	☑	☑	☑	☑
	5	Penanganan Insiden Keamanan SPBE. (Indikator 22)	DISKOMINFOSANTI		Belum terdok	☐	☑	☑	☑	☑
7 Audit TIK										
A	Penyusunan Pedoman Audit TIK									
	1	Menyusun Pedoman Internal Audit TIK (Indikator 9)	DISKOMINFOSANTI		Belum Ada	☑	☐	☐	☐	☐
B	Penyelenggaraan Audit TIK									
	1	Audit Infrastruktur Internal SPBE (Indikator 29)	DISKOMINFOSANTI dan INSPEKTORAT		Belum Dilaks	☑	☑	☑	☑	☑
	2	Audit Infrastruktur Eksternal SPBE (Indikator 29)	DISKOMINFOSANTI		Belum Dilaks	☑	☐	☑	☐	☑
	3	Audit Aplikasi Internal SPBE (Indikator 30)	DISKOMINFOSANTI dan INSPEKTORAT		Belum Dilaks	☑	☑	☑	☑	☑
	4	Audit Aplikasi Eksternal SPBE (Indikator 30)	DISKOMINFOSANTI		Belum Dilaks	☑	☐	☑	☐	☑
	5	Audit Keamanan Internal (Indikator 31)	DISKOMINFOSANTI dan INSPEKTORAT		Belum Dilaks	☑	☑	☑	☑	☑
	6	Audit Keamanan Eksternal (Indikator 31)	DISKOMINFOSANTI		Belum optim keamanan ap	☑	☑	☑	☑	☑

SIMPULAN

Dokumen peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen



dinamis dan fleksibel. Dokumen peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dokumen peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menjadi acuan dalam membangun SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun kedepan demi mewujudkan good governance di Kabupaten Buleleng. Keberhasilan dalam mewujudkan good governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi, harus didukung dengan komitmen tinggi oleh para pemangku kebijakan, khususnya Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Cassidy, A. (1998). *A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning 2nd Edition*, Florida: CRC Press

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Laporan Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Kab. Buleleng Tahun 2022

Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab. Buleleng Tahun 2021

Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

